



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK **iii**

KATA PENGANTAR..... **iv**

DAFTAR ISI..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN HUKUM

TATA USAHA NEGARA

A. Istilah Dan Defenisi Negara Hukum	18
a. Istilah Negara Hukum.....	18
b. Pengertian Negara Hukum	20
B. Istilah Dan Defenisi Hukum Tata Usaha Negara	22
a. Istilah Hukum Tata Usaha Negara	22
b. Defenisi Hukum Tata Usaha Negara.....	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek Dan Objek Hukum Tata Usaha Negara.....	28
a. Subjek Hukum Tata Usaha Negara	28
b. Objek Hukum Tata Usaha Negara.....	30

BAB III TINJAUAN TEORI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Sejarah Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara	36
B. Tujuan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara	45
C. Dasar-Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	47

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang PTUN.....	50
B. Pertimbangan Belum Dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Disetiap Ibukota Kabupaten/Kota	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN